



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja BPPSDMP dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2015 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%) dan (4) kurang berhasil (capaian<60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja BPPSDMP Tahun 2021

Capaian kinerja BPPSDMP diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK BPPSDMP tahun 2021. Rincian hasil capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2021 pada tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja BPPSDMP Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1 Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	75	78,26	104,34	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	2 Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	75	79,92	106,56	Sangat Berhasil
		3 Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian (%)	75%	85,94	114,59	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4 Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)	19	19,83	104,39	Sangat Berhasil
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5 Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)	33,50	34,57	103,19	Sangat berhasil
5.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6 Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)	90,20	89,87	99,63	Berhasil

Sumber data. Pusat dan Sekretariat BPPSDMP, tahun 2021



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Persentase capaian indikator kinerja BPPSDMP tahun 2021 rata-rata Berhasil. Rincian persentase capaian indikator kinerja BPPSDMP tahun 2021 masing-masing adalah sebagai berikut : Petani yang Menerapkan Teknologi yaitu 104,34% (Sangat Berhasil); Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu 106,56% (Sangat Berhasil); Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian yaitu 114.59% (Sangat Berhasil); Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya yaitu 104.39% (Sangat Berhasil); Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu 103,19% (Sangat Berhasil); dan Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu 99,63% (Berhasil).

1. Pengukuran Capaian Kinerja BPPSDMP 2021

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMP masing-masing Indikator Kinerja BPPSDMP tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian

Inovasi teknologi pertanian merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Namun inovasi dan teknologi pertanian tidak akan bermanfaat jika petani tidak menggunakan atau menerapkannya dalam kegiatan usahatani. Hal ini disebabkan petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan pertanian. Agar inovasi dan teknologi dapat diterapkan oleh petani dibutuhkan proses diseminasi inovasi teknologi oleh Penyuluh Pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian berperan sangat penting karena sebagai jembatan teknologi inovasi hasil penelitian bagi petani, sehingga mereka mau dan mampu menerapkan teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas usahatani.

Diseminasi inovasi dan teknologi pertanian merupakan proses penyampaian hasil pengkajian teknologi yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru untuk diterapkan dalam proses produksi atau kegiatan budidaya. Proses inovasi dan diseminasi teknologi pertanian



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

sangat penting dalam mendorong proses penerapan inovasi serta teknologi oleh petani dalam pengelolaan usahatani.

Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakekatnya adalah proses perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) dalam kegiatan usahatani guna meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan petani serta ketahanan pangan. Penyuluh Pertanian merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses diseminasi inovasi dan teknologi kepada petani di WKPP, dengan materi inovasi teknologi yang bersumber dari hasil penelitian dan kajian Badan Litbang atau sumber informasi lainnya. Salah satu indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan produksi dan produktivitas usahatani.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) petani yang menerapkan teknologi, yang salah satunya bersumber dari laporan penyuluh pertanian, telah dicapai sebanyak **17.784.558 petani** yang menerapkan teknologi sepanjang tahun 2021, dari **22.725.437 petani** yang tergabung dalam kelompok tani secara nasional dan terdaftar dalam Aplikasi Simluhtan pada periode tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, untuk pengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dihitung dengan formula:

$$= \frac{(\Sigma \text{Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian})}{\Sigma \text{total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian}} \times 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan teknologi, sebagai berikut:

$$= 17.784.558 / 22.725.437 \times 100\%$$

$$= \mathbf{78,26 \%}$$



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= 78,26 / 75,00 \times 100$$

= 104,34 % (sangat berhasil)

Sesuai hasil perhitungan tersebut, bahwa capaian realisasi persentase petani yang menerapkan teknologi tahun 2021 yaitu sebesar **78,26% atau 17.784.558 petani**, dari target capaian yang ditetapkan sebesar 75% atau 17.044.078 petani. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja petani yang menerapkan teknologi adalah **sangat berhasil** yaitu sebesar **104,34%**.

Capaian realisasi tersebut, sangat dipengaruhi oleh intensifnya kegiatan diseminasi teknologi kepada para petani melalui berbagai metode dan media, antara lain: Sekolah Lapangan (SL), bimbingan teknis, kunjungan, latihan dan supervisi oleh penyuluh pertanian, dll. Terkait hal tersebut, rincian capaian petani yang menerapkan teknologi sebanyak **17.784.558 orang (78,26%)**, diperoleh dari petani yang mengikuti kegiatan:

- a. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi dengan bersumber dari anggaran Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan di 132 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebanyak **26.400 petani**, dengan rincian sebagai berikut: **132 BPP x 2 Penyuluh Pertanian x 5 poktan x 20 petani = 26.400 petani**.

Berdasarkan rincian tersebut, bahwa kegiatan Sekolah Lapang (SL) dilaksanakan di 132 BPP yang bukan merupakan lokasi SL Proyek SIMURP dan Proyek IPDMIP. Setiap BPP melibatkan 2 (dua) penyuluh pertanian untuk mengawal dan mendampingi kegiatan SL. Setiap penyuluh pertanian mengawal 5 poktan dengan diikuti oleh 20 petani.

- b. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi *Climate Smart Agriculture* (CSA) yang bersumber dari anggaran PHLN (Proyek SIMURP) sebanyak **12.160 petani**, yang berasal dari:



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- 1) Petani peserta Sekolah Lapangan (SL) CSA, dengan rincian': $76 \text{ BPP} \times 3 \text{ Penyuluh Pertanian} \times 8 \text{ poktan} \times 5 \text{ petani} = \mathbf{9.120 \text{ petani}}$;
Berdasarkan rincian tersebut, bahwa kegiatan Sekolah Lapang (SL) CSA dilaksanakan di 76 BPP. Setiap BPP melibatkan 3 (tiga) penyuluh pertanian untuk mengawal dan mendampingi kegiatan SL yang melibatkan 8 poktan, dengan diikuti oleh 5 petani dari setiap poktan.
- 2) Petani binaan Koordinator Penyuluh Pertanian (Korluh)/Koordinator BPP dan bukan merupakan petani peserta SL CSA, namun dilakukan pengawalan dan pendampingan oleh Korluh sebagai upaya untuk menjangkau petani lainnya (*outreach*) dalam penerapan teknologi CSA, dengan rincian : $76 \text{ BPP} \times 1 \text{ Koordinator Penyuluh Pertanian} \times 8 \text{ poktan} \times 5 \text{ petani} = \mathbf{3.040 \text{ petani}}$
Berdasarkan rincian tersebut, bahwa setiap Koordinator Penyuluh Pertanian melakukan diseminasi teknologi CSA kepada 8 poktan binaannya yang diikuti oleh 5 petani dari masing-masing poktan dengan ketentuan bukan petani peserta SL CSA.
- c. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi yang bersumber dari anggaran PHLN (Proyek IPDMIP) sebanyak **137.550 petani**, dengan rincian sebagai berikut: **$917 \text{ unit SL} \times 5 \text{ poktan} \times 30 \text{ petani} = 137.550 \text{ petani}$** .
Berdasarkan rincian tersebut, bahwa 917 lokasi Sekolah Lapang (SL) dilibatkan 5 poktan dengan diikuti oleh 30 petani dari setiap poktan.
- d. Fasilitasi bagi Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) sebanyak **192.000 petani**, dengan rincian sebagai berikut : **$2.400 \text{ Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)} \times 4 \text{ poktan} \times 20 \text{ petani} = 192.000 \text{ petani}$** .
2.400 Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) diberikan fasilitasi untuk membuat materi dan mendiseminasikannya kepada 4 poktan binaannya dengan diikuti oleh 20 petani dari setiap poktan.



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- e. Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi **38.878 Penyuluh** Pertanian yang merupakan bantuan operasional bagi Penyuluh Pertanian dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan kepada poktan dan petani binaannya, salah satunya melakukan diseminasi inovasi teknologi. Setiap Penyuluh Pertanian melakukan diseminasi kepada 16 poktan dan diikuti oleh 28 petani. Adapun rinciannya, sebagai berikut: **38.878 penyuluh pertanian x 16 poktan x 28 petani = 17.416.448 petani.**

Pada umumnya, jenis inovasi teknologi yang diterapkan oleh petani, meliputi:

- a. Aspek input
 - 1) Pemupukan Berimbang
 - 2) Penggunaan pupuk kompos dan pestisida nabati
 - 3) Penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB)
- b. Aspek budidaya
 - 1) Penerapan jarak tanam
 - 2) Penerapan sistem penanaman jajar legowo 2:1
 - 3) Penerapan sistem penanaman jajar legowo super
 - 4) Pengendalian hama terpadu
 - 5) Budidaya tanaman dengan sistem organik
 - 6) Budidaya tanaman dengan sistem pertanian terpadu
 - 7) Mekanisasi pertanian (penggunaan alsinta seperti traktor roda dua, tractor roda empat, *combine harvester, rice transplanter*)
 - 8) Sistem Tunda Potong, nutrisi dan pakan ternak
 - 9) Optimalisasi reproduksi IB/KA pengendalian keswan
 - 10) Budidaya Ayam KUB (Kampung Unggul Balitbangtan) dan Bangkok
 - 11) Pengelolaan Kandang semi intensif



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- c. Aspek pengolahan dan packaging
 - 1) Penggunaan Rice Milling Unit/RMU
 - 2) Pengolahan pupuk kompos.

Dokumentasi Kegiatan Sekolah Lapangan tahun 2021





B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

b. Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya.

Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Sumberdaya manusia pertanian yang telah mengikuti pelatihan dan Pendidikan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya dilapangan sehingga berkorelasi dengan peningkatan produksi dan kesejahteraannya. Disamping itu juga berkontribusi dalam upaya mendorong kemajuan pertanian.

Pengukuran indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu peserta pelatihan yang sudah menerapkan materi pelatihan.

Capaian Kinerja dengan IKSK "Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya" tahun 2021 secara rinci terlihat dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6. Realisasi SDM yang menerapkan materi pelatihan.

No	SATKER	Σ Total SDM yang mengikuti pelatihan	Σ SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan	%
2	PPMKP CIAWI	5.056	4.120	81,49
3	BBPKH CINAGARA	4.425	3.454	78,06
4	BBPP LEMBANG	4.706	3.770	80,11
5	BBPP KETINDAN	3.679	3.012	81,87
6	BBPP BATU	4.528	3.594	79,37
7	BBPP BATANGKALUKU	4.122	3.212	77,92
8	BBPP BINUANG	3.116	2.580	82,80
9	BBPP KUPANG	2.946	2.519	85,51
10	BPP JAMBI	3.491	2.701	77,37
11	BPP LAMPUNG	3.819	2.915	76,33
TOTAL		39.888	31.877	79,92



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Nilai rata-rata dari :

(Nilai ((Σ SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan) : (Σ total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian) \times 100%)

Cara pengambilan Data

Σ SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan;

- o Kunjungan Lapang, wawancara, observasi dengan menggunakan instrument dan/atau
- o Menggunakan system aplikasi online.

Σ Total SDM yang mengikuti pelatihan

Realisasi fisik peserta yang mengikuti pelatihan

Berdasarkan target SDM yang mengikut pelatihan tahun 2021 berjumlah 39.388 Orang, jumlah peserta yang sudah menerapkan materi pelatihan 31.877. Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2021 adalah :

$$= 31.877 / 39.888 \times 100$$

$$= \mathbf{79,92 \%}$$

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= 79,92 / 75,00 \times 100$$

$$= \mathbf{106,56\% (Sangat Berhasil)}$$

Target persentase SDM yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2021 adalah 75% dengan realisasi **79,92%**. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja SDM yang menerapkan materi pelatihan adalah **106,56% (Sangat Berhasil)**.



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

d. **Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian.**

Persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dihitung dari jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dan/atau berwirausaha dan/atau melanjutkan studi pendidikan di bidang pertanian.

Lulusan pendidikan vokasi pertanian dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian dari institusi pendidikan di bawah BPPSDMP (Politeknik dan SMK-PP) pada tahun kelulusan.

Realisasi persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2021 adalah 85,94% dari target 75%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian adalah **114,59%** (sangat berhasil).

Rekapitulasi Persentase Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian di UPT pada tabel 7.

Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian

No	Nama UPT	Jumlah Lulusan yang Bekerja di bidang Pertanian
1.	Polbangtan Medan	124
2.	Polbangtan bogor	165
3.	Polbangtan Yogyakarta – Magelang Kampus Magelang	118
4.	Polbangtan Yogyakarta – Magelang Kampus Yogyakarta	100
5.	Polbangtan Malang	192
6.	Polbangtan Gowa	112
7.	Polbangtan Manokwari	58
8.	PEPI	0
9.	SMK-PP Sembawa	156
10.	SMK-PP Banjarbaru	110
11.	SMK-PP Kupang	75
	Total	1210



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Penghitungan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan (Agustus 2020 s.d Agustus 2021) sebagai pembilang.
- 2) Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan sebagai penyebut
- 3) Hasil pembagian pembilang dan penyebut dalam bentuk persen.

Adapun hasil Penghitungan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\sum \text{Lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan}}{\sum \text{Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan}} \right) \times 100\%$$

$$= 1210 / 1408 \times 100\%$$

$$= 85,94 \%$$

Persentase lulusan yang bekerja dibidang pertanian adalah:

$$= 85,94 / 75 \times 100\%$$

$$= 114,59\%$$

Data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian diambil dari sistem informasi penelusuran data alumni (Aplikasi *Treser Study*) dan Group WA alumni.

Formasi kerja lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian antara lain PNS Dinas Pertanian, Wirausaha Pertanian, Perusahaan Swasta dan BUMN yang bergerak dibidang pertanian (misalnya Perkebunan Sawit) dan melanjutkan pendidikan tinggi pertanian (Universitas Negeri/Swasta dan Politeknik Pertanian).

Selain bekerja di bidang pertanian, ada juga lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang non pertanian, hal ini dikarenakan peluang



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

pekerjaan di bidang pertanian terbatas, sehingga beberapa diantara alumni mengambil pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.

Kendala yang dihadapi dalam pengambilan data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian antara lain jumlah lulusan yang banyak dari semua Polbangtan dan SMKPP dan tersebar diberbagai daerah sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan data terbaru dari masing-masing alumni; partisipasi dari alumni dalam mengisi sistem informasi penelusuran data alumni belum berjalan dengan maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua alumni melalui ikatan alumni Polbangtan dan SMKPP dengan cara menyebar link atau tautan sistem informasi penelusuran data alumni ke Group media sosial (Whatapps, Facebook dan media lainnya).

Foto evident lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian.



Alumni Polbangtan yang bekerja di bidang Pemerintahan : CPNS
Pelaksana Pemula Penyuluh Pertanian di DPPKP Kabupaten Purworejo
Jawa Tengah.



Alumni Polbangtan yang bekerja di bidang swasta :Asisten kebun di KPN corp. PT.THIP (PT. Tabung Haji Indo Plantation) Indragiri Hilir Riau.



Alumni Polbangtan yang bekerja sebagai wirausaha di bidang pertanian: Pembibitan Tanaman dengan nama produksi Nur Farm Kebulusan, Kebumen Jawa Tengah.



Alumni SMK-PP yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/ Politeknik
Pembangunan Pertanian (Polbangtan).

e. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian. Indikator peningkatan kapasitas kelembagaan petani yaitu: 1) kelompok tani (poktan) yang meningkat kelas kemampuannya, dan 2) poktan/gapoktan yang bertransformasi menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Secara umum pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatannya, memberdayakan poktan dan gapoktan dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Pembentukan KEP baik yang berbadan hukum atau belum berbadan hukum seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll, dilakukan melalui transformasi kelembagaan petani (poktan/gapoktan) agar lebih terarah



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

dalam berusahatani untuk lebih berorientasi agribisnis sehingga dapat meningkatkan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani.

Transformasi tersebut dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usaha. Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas. Sementara transformasi usahatani dilakukan untuk mengubah cara berusahatani yang semula secara subsistem sekedar pemenuhan kebutuhan dasar menjadi lebih berorientasi agribisnis dan memiliki skala ekonomi komersial, mekanik dan usaha yang menguntungkan dari hulu hingga hilir.

Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas pada gambar 4.



Gambar 4. Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Tujuan Pembentukan KEP, antara lain :

- a. Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
- b. Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
- c. Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
- d. Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;
- e. Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;
- f. Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
- g. Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSPP) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), bahwa kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dikembangkan dari kelembagaan petani (poktan dan gapoktan) serta dievaluasi secara berkelanjutan dan tercantum dalam Simluhtan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, dengan bersumber dari data Simluhtan pada periode 31 Desember 2021 dan laporan jumlah kelembagaan petani yang menjadi KEP, maka diperoleh data sebanyak **12.833 KEP, dan** data gapoktan secara nasional serta terdaftar dalam aplikasi SIMluhtan periode 31 Desember 2021 sebanyak **64.598 gapoktan**.

Adapun formula/cara menghitung persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, yaitu :

$$=(\Sigma \text{Kelembagaan Ekonomi Petani}) / (\Sigma \text{Total Kelembagaan Gapoktan}) \times 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2021, sebagai berikut:



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

$$= 12.833 / 64.598 \times 100$$

$$= \mathbf{19,83 \%}$$

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= 19,83 / 19,00 \times 100$$

$$= \mathbf{104,39\% (Sangat Berhasil)}$$

Sesuai hasil perhitungan tersebut, bahwa capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2021 yaitu sebesar **19,83% atau 12.833 KEP**, dari target capaian yang ditetapkan sebesar 19%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah **sangat berhasil** yaitu sebesar **104,39%**. Bentuk-bentuk KEP yang ditumbuhkan dan dikembangkan yaitu : Koperasi Tani, PT, CV, Kelompok Usaha Bersama (KUB), gapoktan bersama, LKMA, dll.

e. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP.

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP aspek Pemenuhan dan Reform melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB berdasarkan hasil kesepakatan Tim Asesor Reviu dengan Itjen Kementan. Sumber data dari nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu di Bagian Umum Sekretariat BPPSDMP dan UPT lingkup PPSDMP. Data diperoleh dengan melihat hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP untuk level Eselon I merupakan nilai komponen 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada aspek Pemenuhan dan Reformasi yaitu (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas; (7) Penguatan Pengawasan; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

merupakan evaluasi mandiri atas implementasi 8 (delapan) area perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2018.

Hasil penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang telah dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Jenderal menghasilkan nilai **34,57**. Rincian Nilai tersebut adalah sebagai berikut :

= Penilaian capaian sub komponen pemenuhan + Penilaian capaian sub komponen reform

$$= \mathbf{13,97 + 20,60 = 34,57}$$

Rincian hasil capaian sub komponen pemenuhan dari penilaian komponen pengungkit pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sub Komponen Pemenuhan BPPSDMP tahun 2021

No	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,96	97,80
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,90	95,00
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,97	97,22
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,35	96,43
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,26	90,30
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,10	95,66
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,43	97,33
	Jumlah	14,60	13,97	95,71

Sumber data : Sekretariat BPPSDMP tahun 2021

Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada sub komponen pemenuhan BPPSDMP tahun 2021 adalah **13,97**.

Rincian hasil capaian sub komponen reform dari penilaian komponen pengungkit pada tabel 9.



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel 9. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sub Komponen Reform BPPSDMP tahun 2021

No	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	3,00	1,63	54
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	100
4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	100
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,61	81
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,75	100
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,92	98
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,44	92
	Jumlah	21,70	20,60	94,93

Sumber data : Sekretariat BPPSDMP tahun 2021

Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada sub komponen reform BPPSDMP tahun 2021 adalah **20,60**.

Target nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP adalah nilai **33,50**. Realisasi nilai PMPRB BPPSDMP tahun 2021 adalah nilai **34,57**. Sehingga capaian kinerja nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu :

$$= 34,57/33,50 \times 100$$

$$= 103,19\% \text{ (Sangat Berhasil)}$$

f. Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP.

Hasil evaluasi Nilai Kinerja Anggaran adalah berdasarkan PMK 214 Tahun 2017. Sumber data Nilai kinerja anggaran BPPSDMP adalah pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BPPSDMP. Pihak yang melakukan pengukuran adalah Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BPPSDMP dan UPT lingkup BPPSDMP.

Rumus menghitung Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu : **NK = (I X W_I) + (CH X W_{CH})**

Dimana I = (P X W_P) + (K X W_K) + PK X W_{PK}) + NE X W_E) Keterangan rumus:



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- I = Nilai aspek implementasi
- W_I = Bobot aspek implementasi
- CH = Capaian hasil
- P = Penyerapan anggaran
- W_P = Bobot penyerapan anggaran
- K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- W_K = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- PK = Pencapaian keluaran
- W_{PK} = Bobot pencapaian keluaran
- NE = Nilai efisiensi
- W_E = Bobot efisiensi

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 39 sebagai berikut:

- 1) $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik
- 2) $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan Baik
- 3) $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal
- 4) $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan Kurang
- 5) $NK \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang

Realisasi nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2021 adalah nilai **89,87** termasuk kategori nilai kinerja (NK) Kurang. Realisasi capaian tersebut adalah nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2021 yang bersumber dari nilai SMART pada aplikasi PMK 214 tahun 2017.

Pencapaian nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2021 bersumber dari nilai SMART pada aplikasi PMK 214 tahun 2017 pada gambar 5.



Nilai Kinerja
89.87
Baik



Gambar 5. Pencapaian Kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2021.

Target Nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2020 adalah **nilai 90,20**, sehingga capaian kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2021 yaitu

$$= \mathbf{89,87 / 90,20 \times 100}$$

$$= \mathbf{99,63\% \text{ (berhasil)}}$$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja BPPSDMP 3 (tiga) tahun 2019–2021.

a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian

Pada perjanjian Kinerja BPPSDMP tahun 2019, indikator kinerjanya adalah rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional. Realisasinya pada tahun 2019 yaitu sebesar 15,64% dari target 15%.

Sedangkan Perjanjian Kinerja BPPSDMP tahun 2020 dan 2021, indikator kinerjanya adalah presentase petani yang menerapkan teknologi



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

pertanian dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 72,03% dari target 70%, sementara untuk tahun 2021 sebesar 78,11% dari target 75%.

b. Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya.

Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya baru menjadi target PK BPPSDMP di tahun 2020. Maka target ini tidak dapat dibandingkan dari tahun 2019. Adapun target realisasi tahun 2020 sebesar 99,50% dari target 60%. Sementara realisasi tahun 2021 sebesar 79,92% dari target 75%.

c. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian.

Pada Perjanjian Kinerja BPPSDMP tahun 2019, indikator kinerjanya adalah rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan. Realisasinya yaitu pada tahun 2019 sebesar 90,28% dari target 90%, pada tahun 2020 yaitu 76,62% dari target 65% dan pada tahun 2021 yaitu 85,94% dari target 75%. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Dibidang Pertanian Tahun 2019-2021 pada tabel 10.

Tabel 10. Persentase Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Dibidang Pertanian Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian	
		Target	Realisasi
1	2019	90%	90,28%
2	2020	65%	76,62 %
3	2021	75%	85,94%

d. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

Pada Perjanjian Kinerja BPPSDMP tahun 2019, indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

total kelembagaan petani nasional dengan realisasi ditahun 2019 sebesar 30% dari target 30%.

2. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional dengan realisasinya ditahun 2019 sebesar 2,41 dari target 2,4%.

Sedangkan pada Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2020-2021, indicator kinerjanya adalah persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan realisasi di tahun 2020 sebesar 18,00% dari target 18.00%, dan di tahun 2021 sebesar 19,76% dari target 19%.

- e. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP.

Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP baru menjadi target PK BPPSDMP di tahun 2020. Target Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP Tahun 2021 adalah 33,50 nilai.

Perbandingan realisasi kinerja Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP hanya bisa dilakukan selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2020–2021. Karena indikator kinerja baru menjadi target PK BPPSDMP di tahun 2020. Realisasi kinerja Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP tahun 2020 sebesar 34,56% dari target nilai 33,25%. Sedangkan tahun 2021 sebesar 34,57 dari target nilai 33,50.

- f. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP.

Pada Perjanjian Kinerja BPPSDMP tahun 2019, indikator kinerjanya adalah Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017). Realisasi pada tahun 2019 sebesar 89,03 % Sedangkan Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2020-2021, indicator kinerjanya adalah Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP dengan realisasi tahun 2020 sebesar 75,85% dari target 90%, sedangkan tahun 2021 sebesar 89.87% dari target 90,20%.



3. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024).

Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024) pada tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024)

No	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020 (%)	Realisasi tahun 2021(%)	Target Jangka Menengah Renstra BPPSDMP 2020-		
				2022	2023	2024
1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	70,19	78,26	80	85	90
2	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya	99,50	79,92	80	85	90
3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian	76,62	85,94	80	85	90
4	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	18	19,83	20	21	22
5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP	34,56	34,57	33,75	34,00	34,25
6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	75,85	89,87	90,40	90,60	90,80

Sumber Data. BPPSDMP tahun 2021

- Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian. Capaian kinerja Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian yaitu sebesar **104,34%**, sedangkan target jangka menengah dalam renstra (tahun 2024) yaitu **90,00%**
- Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya. Capaian kinerja Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu sebesar **106,56%**, sedangkan target jangka menengah dalam renstra (tahun 2024) yaitu **90,00%**.
- Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian. Capaian kinerja Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian yaitu sebesar **114,59%** sedangkan target jangka menengah dalam renstra (tahun 2024) yaitu **90,00%**.



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- f. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya. Capaian kinerja Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya yaitu sebesar **104,39%**, sedangkan target jangka menengah dalam renstra (tahun 2024) yaitu **22,00%**.
- g. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP. Capaian kinerja Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu sebesar **103,19%**, sedangkan target jangka menengah dalam renstra (tahun 2024) yaitu **34,25**.
- h. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP. Capaian kinerja Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu sebesar **99,63%**, sedangkan target jangka menengah dalam renstra (tahun 2024) yaitu **90,80%**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi

- a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian. Realisasi kinerja yaitu sebesar 78,26%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. Capaian tersebut, diperoleh dari keberhasilan penyuluh pertanian dalam diseminasi teknologi pertanian yaitu meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian realisasi petani yang menerapkan teknologi pertanian, antara lain:

1. Dukungan Kementerian Pertanian dalam optimalisasi peran dan fungsi BPP sebagai pusat data dan informasi melalui penyediaan Sarana IT bagi BPP
2. Dukungan BPPSDMP c.q Pusat Penyuluhan Pertanian dalam penderasan informasi dan materi penyuluhan pertanian serta diseminasi inovasi teknologi yang dilakukan melalui berbagai media antara lain : media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya, dll), video tutorial, infographis, dan media online/daring seperti website cyber extension,



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

dan acara “Ngobrol Asyik”/Ngobras serta acara “Mentan Sapa Petani dan Penyuluh” (MSPP) yang dilakukan secara rutin pada setiap hari Selasa dan Jum’at.



3. Dukungan BPPSDMP c.q Pusat Penyuluhan Pertanian melalui fasilitasi pembiayaan untuk penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui Dana Dekonsentrasi bagi 34 provinsi, berupa fasilitasi anggaran kegiatan Sekolah Lapangan (SL), fasilitasi bagi Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS), Honorarium dan BPJS bagi THL-TB PP, Biaya Operasional Penyuluh (BOP), pengawalan dan pendampingan secara berjenjang dari mulai provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan, dan dukungan manajemen satker.
4. Dukungan BPPSDMP c.q Pusat Penyuluhan Pertanian melalui fasilitasi lainnya, berupa:
 - 1) Renovasi BPP untuk optimalisasi 5 peran BPP
 - 2) Penyediaan paket data bagi penyuluh pertanian
 - 3) Fasilitasi Demonstrasi Farming (Demfarm) penerapan inovasi teknologi yang bersumber dari PHLN (IPDMIP)
 - 4) Pelatihan/Training of Farmer (TOF) yang bersumber dari kegiatan SIMURP



Training of Farmers (ToF) Climate Smart Agriculture (CSA) (SIMURP) di Kec. Pagaden Kab. Subang Jawa Barat Sep 2020



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

5. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan, dll, guna meningkatkan kinerjanya
6. Penyediaan aplikasi yang terkoneksi dengan internet untuk ketersediaan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian yaitu aplikasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan *Cyber Extension*. *Cyber extension* merupakan pengembangan informasi dan inovasi pertanian berbasis teknologi informasi dan inovasi komunikasi (TIK) dengan menggunakan jaringan komputer terprogram yang terkoneksi dengan internet. Berkembangnya sistem penyuluhan pertanian melalui *cyber extension* akan lebih mampu mengembangkan sistem akses informasi aktual, inovasi, kreativitas dan uji lokal serta dapat meningkatkan keberdayaan penyuluh pertanian melalui penyiapan informasi dan materi penyuluhan pertanian secara tepat waktu;
7. Pengawasan dan pendampingan penyuluh pertanian secara berjenjang dari mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa melalui kegiatan: latihan, kunjungan, supervisi, pertemuan *offline* dan *online*, dll
8. Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Adapun beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai Indikator jumlah petani yang menerapkan teknologi, antara lain:

1. Masih adanya wabah pandemi covid-19, sehingga berdampak terhadap refocusing anggaran dan kegiatan penyuluhan pertanian baik di pusat maupun melalui Dana Dekonsentrasi yang berakibat belum optimalnya capaian output kegiatan penyuluhan pertanian;
2. Keterbatasan akses dan sarana prasarana media informasi dan komunikasi serta sarana pendukung kegiatan penyuluhan lainnya pada beberapa Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, BPP, penyuluh pertanian, dan petani

3. Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM), antara lain:
 - 1) Pada umumnya tingkat pendidikan petani rendah, hal ini menyebabkan kemampuan dalam mengolah informasi dan mengadopsi teknologi relative sangat terbatas;
 - 2) Pada umumnya, petani pengguna inovasi merupakan petani yang berskala kecil dan kurang berani menanggung resiko dalam mengadopsi inovasi serta teknologi pertanian;
 - 3) Keterbatasan kualitas dan kuantitas Penyuluh Pertanian di lapangan.
4. Latar belakang sosial budaya masyarakat yang majemuk sehingga mengakibatkan timbulnya multipersepsi terhadap introduksi inovasi dan teknologi baru.
- b. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya. Realisasi kinerja yaitu sebesar 79,92%, sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%.

Keberhasilan memenuhi target yang telah ditetapkan didukung oleh:

- 1) Identifikasi kebutuhan pelatihan;

Pelatihan yang baik akan membawa perubahan kepada pesertanya, namun untuk menyelenggarakan pelatihan yang baik tersebut maka harus dilakukan Identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara Standar Kompetensi Kerja (SKK) dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan kekurangan Kompetensi Kerja (KKK).



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

2) Metode dan kurikulum pelatihan yang tepat;

Metodologi Pelatihan ditentukan sesuai dengan sasaran peserta Pelatihan yang akan dilatih. Metodologi Pelatihan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogy), Experiential Learning Cycle (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Pendekatan ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktik, magang, bermain peran, dan/atau penugasan.

Penyusunan kurikulum didasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) masing-masing mata Pelatihan. Penyusunan kurikulum berdasarkan AKP dirinci ke dalam tujuan, asaran, mata Pelatihan; dan silabus. Selain Penyusunan Kurikulum juga disusun silabus Pelatihan, Penyusunan silabus pelatihan didasarkan pada elemen Kompetensi, Kriteria Unjuk Kerja (KUK), indikator unjuk kerja, materi Pelatihan; dan perkiraan waktu Pelatihan. Kurikulum dan silabus dibobot ke dalam perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran.

3) Profesionalisme Ketenagaan pelatihan (pengelola pelatihan dan widyaiswara)

Penetapan Ketenagaan Pelatihan didasarkan pada kesesuaian Kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran; Kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; kemampuan menilai hasil berlatih peserta; jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan pengutamaan bagi yang memiliki sertifikat Pelatihan bagi pelatih di bidangnya.



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

4) Prasarana dan Sarana pelatihan yang mendukung;

Penyediaan prasarana dan sarana Pelatihan disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses Pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang Pelatihan.

5) Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan

Peserta yang aktif dalam mengikuti pelatihan ikut berperan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaan Kegiatan SDM yang meningkat kapasitasnya, ini ditunjukkan antara lain: peserta aktif dalam proses pelatihan baik dikelas maupun pada saat praktek, peserta mempelajari materi yang diberikan, peserta mengerjakan test dengan serius, peserta aktif diskusi dengan peserta lain dalam rangka sharing experience

Hambatan dan upaya penanggulangan:

Adanya refocusing anggaran akibat dari Pandemi Covid-19 dan tambahan anggaran biaya tambahan, mengakibatkan target penyuluh dan petani yang akan ditingkatkan pengetahuannya melalui pelatihan berkurang jumlah. Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk tetap meningkatkan pengetahuan bagi penyuluh dan petani telah dilaksanakan program pelatihan online berbasis Learning Management System (LMS) dan Zoom Meeting dengan nama Bertani On Cloud (BOC). Dengan BOC maka peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan pertanian tetap dapat dilaksanakan tanpa terkendala jarak, ruang dan waktu.

Hambatan dalam pengukuran indikator kinerja sasaran kegiatan Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya untuk tahun 2021, variabelnya adalah peserta pelatihan yang menerapkan materi pelatihan dan didukung dengan eviden penerapannya. Hambatannya adalah purnawidya pelatihan memerlukan sarana untuk menyampaikan eviden penerapan materi pelatihan. Sedangkan penyelenggara pelatihan memerlukan waktu untuk merekap dan menyajikan data.



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Upaya penanggulangan yang dilakukan agar purnawidya peserta pelatihan dapat menyampaikan eviden penerapan materi pelatihan, dan penyelenggara Pelatihan dapat dengan cepat menyajikan laporan dari hasil yang disampaikan oleh purnawidya, pusat pelatihan pertanian telah menyiapkan aplikasi dengan nama e-pik (elektronik pengukuran indicator kinerja) dimana penyelenggara pelatihan dan purnawidya dapat memanfaatkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

- c. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian. Realisasi kinerja yaitu sebesar 85,94%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%.

Keberhasilan capaian kinerja jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian disebabkan karena:

- 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan Vokasi Pertanian dengan tujuan untuk mencetak wirausahawan muda pertanian dan pelaku pertanian.
- 2) Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Polbangtan dan SMK PP menggunakan kurikulum dengan bobot 70 % praktik , 30 % teori dan menggunakan model pembelajaran *teaching factory* yang mampu memberikan kompetensi sesuai dengan program studi dan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI). Alokasi anggaran untuk mendukung proses pembelajaran di Polbangtan dan SMKPP adalah Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian.
- 3) Pelaksanaan seminar/kuliah umum dengan mengundang narasumber berpengalaman yang mampu memotivasi dan menginspirasi siswa dan mahasiswa sehingga tumbuh semangat dan kecintaan terhadap dunia pertanian. Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

tersebut adalah Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian.

- 4) Dukungan program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) yang sangat efektif menumbuhkan jiwa wirausaha bagi siswa dan mahasiswa dalam membangun mental dan semangat berwirausaha selama menjadi peserta didik dibidang pertanian sehingga ketika lulus telah memiliki pola pikir kewirausahaan dan jenis usaha di bidang pertanian yang akan dilakukan setelah lulus. Alokasi anggaran untuk mendukung program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) adalah Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian.
- 5) Dukungan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) di bidang pertanian dalam beberapa hal, diantaranya para praktisi/pakar pertanian terlibat dalam penyusunan kurikulum, menjadi dosen/pengajar pada setiap program studi sesuai dengan kompetensi, program magang bagi dosen dan mahasiswa atau siswa di industri. Alokasi anggaran untuk mendukung kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) di bidang pertanian.
- 6) Dukungan program pelatihan khusus/*retooling* bagi siswa/mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan professional dan balai pelatihan pertanian serta industri yang dapat memberikan pemahaman dan kompetensi sesuai dengan dunia kerja. Sehingga setelah mengikuti program pelatihan/*retooling* tersebut mahasiswa/siswa langsung dilakukan seleksi oleh dunia usaha dan dunia industri untuk bisa di rekrut sebagai karyawan/pegawai di bidang pertanian. Alokasi anggaran untuk mendukung program pelatihan khusus/*retooling* bagi siswa/mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan professional dan balai pelatihan pertanian serta industri adalah Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Mengikuti.
- 7) Dukungan dari proses seleksi minat dan bakat dibidang pertanian yang dilakukan pada saat seleksi masuk Polbangtan dan SMK PP, sehingga mahasiswa dan siswa sudah sejak dari awal masuk perkuliahan sudah



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

memiliki jiwa cinta pertanian. Alokasi anggaran untuk mendukung proses pembelajaran di Polbangtan dan SMKPP adalah proses seleksi minat dan bakat dibidang pertanian yang dilakukan pada saat seleksi masuk Polbangtan dan SMK PP.

d. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.

Realisasi kinerja yaitu sebesar 19,83%, sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 19%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, meliputi:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian melakukan Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada Petugas pendamping dari Dinas Pertanian yang menangani urusan penyuluhan di 100 kabupaten/kota dan 27 provinsi
2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q Pusat Penyuluhan Pertanian membangun sinergitas dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi;
3. Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya dan Trubus) yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Tahun 2021;
4. Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online, yaitu melalui Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik Penyuluhan Pertanian (NGobras) yang dilakukan secara daring oleh Pusat Penyuluhan Pertanian setiap minggu, serta website cyber extension;
5. Bersinergi dengan Eselon II Lingkup BPPSDMP dan Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian dalam penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi, Pusat Gerakan pembangunan pertanian, Pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring kemitraan serta dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi.

6. Pengawasan dan pendampingan penyuluh pertanian terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan petani, melalui langkah-langkah, sebagai berikut:
 - 1) Melakukan identifikasi kepada poktan, gapoktan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu:
 - a. Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar;
 - b. Memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya;
 - c. Memiliki rencana usaha;
 - d. Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
 - e. Telah membangun jejaring pengembangan usaha;
 - f. Telah membangun kemitraan usaha;
 - 2) Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi;
 - 3) Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi:
 - a. Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani;
 - b. Manfaat kelembagaan ekonomi petani;
 - c. Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
 - d. Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi kelembagaan ekonomi petani;
 - e. Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pengawas/komisaris.
 - 4) Memfasilitasi rembug tani atau musyawarah untuk menyepakati rencana pembentukan KEP;



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- a. Peningkatan sinergitas dengan unit kerja lingkup BPPSDMP dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian serta Kementerian dan lembaga Lain dalam penumbuhkembangan korporasi
- b. Dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapaitas kelembagaan petani melalui berbagai metode
- c. Tumbuhnya kesadaran petani untuk mengembangkan usahatani yang diwadahi kelembagaan ekonomi petani.

Dokumentasi : Profil Kelembagaan Ekonomi Petani



Adapun beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, antara lain:

1. Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi akibat dilakukan refocusing anggaran;
2. Belum adanya petunjuk teknis dan SOP tentang pembentukan KEP;
3. Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pembentukan KEP;
4. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan petani dalam pengelolaan manajemen dan usaha;



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

5. Belum sinerginya antar instansi dan K/L lainnya dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP/Korporasi;
 6. Kelembagaan ekonomi petani masih belum berorientasi usaha produktif;
 7. Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan dan pemasaran;
 8. Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;
 9. Kelembagaan ekonomi petani belum mampu menghubungkan dengan sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar sehingga belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya;
 10. Kompetensi petani sebagai pengelola KEP dan infrastruktur teknologi yang rendah serta kualitas pengelolaan usahatani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi, pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara profesional.
- e. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai). Realisasi nilai kinerja PMPRB BPPSDMP tahun 2021 yaitu sebesar 34,57. Sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 33,50%.

Capaian tersebut diperoleh karena proses pelaksanaan sesuai rencana aksi BPPSDMP terhadap Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021 pada 8 area perubahan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian telah membentuk:

- Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Penilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup BPPSDMP dengan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 02/Kpts/OT.240/I/01/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Penilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup BPPSDMP;
- Road Map Reformasi Birokrasi BPPSDMP Tahun 2020 -2024 dengan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

10/Kpts/OT.240/I/01/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi BPPSDMP Tahun 2020 -2024;

- Agen Perubahan dengan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 12/Kpts/OT.240/I/01/2021 tentang Agen Perubahan lingkup BPPSDMP.

2. Penataan Peraturan perundang-undangan

- BPPSDMP bersama dengan Tim Panitia Antar Kementerian melakukan pembahasan dan penyusunan Peraturan Presiden tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian dan Pembentukan Badan Otorita sebagai salah satu perwujudan untuk meningkatkan produktifitas pangan Indonesia sesuai dengan program presiden;

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021 tentang tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian dengan membahas dan menyusun Uraian Tugas Koordinator dan Subkoordinator lingkup BPPSDMP;
- Pengajuan usulan pembentukan Tata Usaha di lingkup Pusat BPPSDMP.

4. Penataan Ketatalaksanaan

- Reviu dan evaluasi SOP terkait Peta Bisnis Proses, sehingga BPPSDMP menjadi 4 SOP Makro dan 15 SOP Mikro, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian 2020 – 2024;
- Pengembangan e-Government yang dimiliki BPPSDMP sehingga mempermudah pengguna layanan dalam mengakses kebutuhan pengguna layanan.
- Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik
- Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal dengan mendapatkan juara 3 pada lomba kearsipan Kementerian Pertanian



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Meningkatkan kemampuan SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif melalui pelatihan-pelatihan yang di lakukan secara webinar maupun pelatihan secara *offline* pada Balai Pelatihan Pertanian BPPSDMP;
- Pembinaan dan Bimtek Program Ketrampilan Dasar Teknis Instruksional (Pekerti) / Applied Approach (AA) bagi Dosen.

6. Penguatan Akuntabilitas

- Revisi Renstra BPPSDMP ;
- Penyusunan Indikator Kinerja ;
- Pemutahiran Rencana Aksi;
- Updating data Perjanjian Kinerja;
- Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat dan Laporan Kinerja BPPSDMP;
- Pelaksanaan Rapat Pimpinan.

7. Penguatan Pengawasan

- Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja pelayanan publik lingkup BPPSDMP, ada 7 unit kerja usulan BPPSDMP yang diusulkan untuk menjadi unit kerja WBK WBBM:
 - a. BBPP Batangkaluku (WBBM);
 - b. PPMKP Ciawi (WBK);
 - c. Polbangtan Yogyakarta-Magelang (WBK);
 - d. Polbangtan Malang (WBK);
 - e. BBPP Batu (WBK);
 - f. BBPP Binuang (WBK);
 - g. BPP Lampung(WBK).

dan unit kerja diatas sudah melakukan Penerapan ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Mengikuti kompetisi Inovasi pelayanan publik sebanyak 2 unit kerja pelayanan publik lingkup BPPSDMP yang mewakili Kementerian Pertanian:



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- a. Aplikasi Si Juru Tani (Polbangtan Yoma);
 - b. Aplikasi D'Corp Model (BBPP Binuang).
- Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unit kerja BPPSDMP;
 - Melakukan evaluasi standar pelayanan publik terhadap unit kerja pelayanan publik.

Upaya yang akan dilakukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian mendatang.

1. Melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis untuk peningkatan
 2. pelayanan publik dengan melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi
 3. informasi;
 4. Reformulasi Tim Agen Perubahan lingkup BPPSDMP
 5. Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 Pusat Pendidikan Pertanian
- f. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP. Realisasi Nilai kinerja anggaran yaitu sebesar 89.87%. Jadi belum mencapai target kinerja BPPSDMP Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu 90.20%.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SMART Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2021 mencapai **99,63% (berhasil)**.

Capaian Output Program (COP) telah mencapai **100,00%**, pada aspek ini tidak ada indikator yang statusnya pending, sehingga capaian bisa maksimal.

Penyerapan adalah realisasi anggaran lingkup BPPSDMP yang sudah mencapai **98,21%**.

Konsistensi mencapai **91,97%**, sudah cukup konsisten. Nilai Konsistensi 91,98%.

Efisiensi berada pada batas 4.42 atau efisien dikarenakan capaian output yang lebih tinggi dibandingkan dengan serapan anggaran (0 s.d. -20 tidak efisien; 0,1 s.d. 20 Efisien).



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Nilai Efisiensi, adalah konversi persentase dari capaian **Efisiensi** yang dihitung secara otomatis oleh Sistem Aplikasi di DJA, Kementerian Keuangan, sehingga Efisiensi 4,42 = Nilai Efisiensi 61,05%.

Berdasarkan data tersebut, semua aspek sudah tercapai secara optimal, namun Nilai Efisiensi hanya tercapai 61,05%. Hal ini disebabkan capaian kegiatan fisik sebesar 100%, beriringan dengan capaian anggaran yang juga maksimal, sehingga efisiensi biaya hanya sedikit.

Pada aplikasi SMART, jika Efisiensi diperoleh lebih dari 20% (dua puluh persen), maka Nilai Efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100%, dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen). Jadi apabila serapan dicapai maksimal 100% dan Capaian Rincian Output juga maksimal 100%, maka Efisiensi = 0 (nol) karena tidak ada efisiensi disana, dan Nilai Efisiensinya mencapai nilai skala 50%.

Kendala yang ditemui dalam pengumpulan data terkait pencapaian kinerja:

- 1) Sering bergantinya admin/petugas entri data pada aplikasi SMART terutama pada satker Dekonsentrasi dan kadang tidak ada *transfer knowledge* dari petugas yang lama;
- 2) Kurangnya SDM di daerah sehingga Admin/petugas monev ada yang merangkap sebagai Penyuluh, PPK, menangani bidang keuangan, menangani bidang program/ perencanaan, bahkan sekaligus sebagai admin satker lainnya selain satker 10 (BPPSDMP), seperti Tanaman Pangan, Hortikultura, PKH, dan PSP;
- 3) Nilai konsistensi tidak mencapai nilai maksimal 100% karena masih terdapat 25 satker di daerah yang nilai konsistensinya kurang dari 90%, hal ini disebabkan tidak/terlambat melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman lembar III DIPA;



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

- 4) Nilai Efisiensi seluruh satker lingkup BPPSDMP masih dibawah 80% karena rata-rata capaian Rincian Output (RO) tercapai dengan anggaran yang maksimal, hanya sedikit efisiensi biaya.

Rekomendasi yang akan dilakukan dimasa mendatang:

- 1) Sekretariat BPPSDMP secara rutin menyelenggarakan Bimtek SMART per semester setiap tahunnya, namun masih diperlukan pemantauan dan pembinaan secara intensif juga dari masing-masing Unit Kerja Eselon II Pusat sebagai penanggung jawab di satker Dekon dan UPT Pusat;
- 2) Mengoptimalkan SDM yang ada, dan admin satker proaktif melakukan koordinasi ke pusat melalui media sosial/ WAGrup;
- 3) Perlu koordinasi secara rutin dengan bidang yang menangani perencanaan terkait RPD yang masih dinilai tidak konsisten oleh sistem SMART, agar dapat dilakukan revisi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 4) Masih rendahnya efisiensi dipengaruhi oleh ketercapaian Rincian Output (RO) dan realisasi anggaran masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO), oleh karena itu perlu dimaksimalkan capain RO diikuti dengan adanya efisiensi biaya;
- 5) Nilai Kinerja satker didorong untuk lebih ditingkatkan lagi terutama pada aspek konsistensi dan aspek efisiensi.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Berdasarkan aplikasi SMART PMK 214 yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2021, pencapaian pelaksanaan anggaran Kinerja lingkup BPPSDMP tahun 2021 sebesar nilai 99,63% dari target nilai 90.20.

Keterangan :

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 39 sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% dikategorikan dengan Sangat Baik;
- b. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% - 90% dikategorikan dengan Baik;
- c. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% - 80% dikategorikan dengan Cukup;
- d. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% - 60% dikategorikan dengan Kurang;
- e. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran BPPSDMP tahun 2021 berdasarkan aplikasi SMART Nomor 214/PMK.02/2017 termasuk kedalam kategori nilai kinerja Sangat Kurang (NK Anggaran \leq 50%). Realisasi kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2021 adalah Nilai 89,87 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Capaian Ouput Program = 100
- b. Penyerapan = 98.34
- c. Konsistensi = 91.98
- d. Efisiensi = 4.42
- e. Capaian Sasaran Program = 100
- f. Rata-rata NKA Satker = 83.98
- g. Nilai Efisiensi = 61.05

Analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 214/2017 dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut :



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

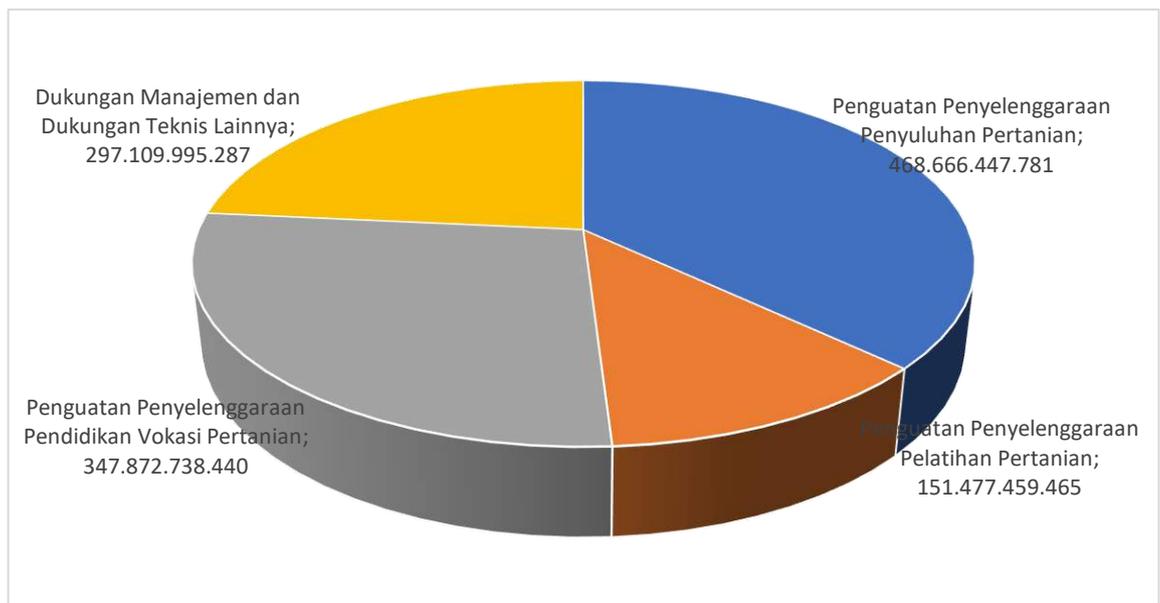
297.109.995.287,-; Pagu dan realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2021 pada tabel 12.

Tabel 12. Pagu dan Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2021.

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)		
		PAGU	REALISASI	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	479.692.915.000	468.666.447.781	97,70
2	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	154.267.686.000	151.477.459.465	98,19
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	351.304.745.000	347.872.738.440	99,02
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	301.254.548.000	297.109.995.287	98,62
	TOTAL	1.286.519.894.000	1.265.126.640.973	98,34

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP tahun 2021

Persentase realisasi anggaran per kegiatan lingkup BPPSDMP tahun 2021 pada gambar 6.



Gambar 6. Persentase realisasi anggaran per kegiatan lingkup BPPSDMP tahun 2021.

Realisasi anggaran per output kegiatan tahun 2021 yang *tertinggi* adalah Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu 99,02%,



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

sedangkan *terendah* adalah pada Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu 97,70%.

Rincian realisasi anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

A. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Tabel 13. Persentase Realisasi Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2021.

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Pusat Penyuluhan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	167.349.796.000	162.478.297.180	97,09
2	Dekonsentrasi (DK)	312.343.119.000	306.188.150.601	98,03
	Total	479.692.915.000	468.666.447.781	97,70

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2021

Persentase realisasi anggaran per output kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tahun 2021 yang *tertinggi* adalah Dekonsentrasi (DK) yaitu 98,03%, sedangkan *terendah* Pusat Penyuluhan Pertanian/ Kantor Pusat (KP) yaitu 97,07%.

B. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Tabel 14. Persentase Realisasi Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2021.

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Pusat Pelatihan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	37.390.295.000	36.443.496.574	97,47
2	UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD)	116.877.391.000	115.033.962.891	98,42
	Total	154.267.686.000	151.477.459.465	98,19

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2021

Persentase realisasi anggaran per output kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian tahun 2021 yang *tertinggi* adalah UPT Pelatihan /



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Kantor Daerah (KD) yaitu 98,42%, sedangkan *terendah* Pusat Pelatihan Pertanian/ Kantor Pusat (KP) yaitu 97,47%.

C. Pendidikan Pertanian

Tabel 15. Persentase Realisasi Anggaran Pendidikan Pertanian Tahun 2021.

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Pusat Pendidikan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	35.291.756.000	34.953.149.078	99,04
2	UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD)	315.975.489.000	312.882.089.362	99,02
3	Dekonsentrasi (DK)	37.500.000	37.500.000	100,00
	TOTAL	351.304.745.000	347.872.738.440	99,02

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2021

Persentase realisasi anggaran per output kegiatan Pendidikan Pertanian tahun 2020 yang *tertinggi* adalah Dekonsentrasi (DK) yaitu 100%, sedangkan *terendah* adalah UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD) yaitu 99,02%.

D. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP

Tabel 16. Persentase Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2021

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Sekretariat BPPSDMP / Kantor Pusat (KP)	301.254.548.000	297.109.995.287	98,62
	Total	301.254.548.000	297.109.995.287	98,62

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2021

Persentase realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP tahun 2021 yaitu 98,62%.